

Di antara lembaga zakat yang ada di Ponorogo ialah Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang ditangani oleh jajaran pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian terkait seperti kementerian agama, kementerian sosial dsb. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana pengelolaan zakat dan pendaayagunaannya di masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Membayar zakat sebagai rukun Islam biasa dilakukan oleh wajib zakat di daerah tempat tinggalnya. Pengelolaan harta zakat dilakukan oleh individu dan kelompok atau lembaga. Di beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait ada lembaga-lembaga amil zakat yang mengelola zakat dengan manajemen modern. Di antaranya *Bayt al-Zakāh al-Kuwaytiy*. Di Indonesia pun sebenarnya banyak lembaga pengelola zakat dan dana lainnya seperti infak, sedekah dan wakaf, baik itu lembaga yang didirikan pemerintah, organisasi keagamaan, maupun lembaga swasta yang independen.

Peneliti setelah melakukan observasi ke beberapa lembaga amil zakat di Ponorogo dan beberapa orang muzaki yang sudah sejak lama melaksanakan zakat menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan zakat di antaranya:

1. Di Ponorogo sebenarnya sudah ada beberapa lembaga amil zakat, kepanitiaan zakat termasuk amil zakat fitrah yang merupakan panitia tahunan di masjid-masjid, Di antaranya adalah Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera, Lembaga

Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammaiyyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU), Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo. Masing-masing lembaga mempunyai pola yang berdeda-beda dan tidak ada kordinasi sesama mereka. Pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga itu diperkirakan belum maksimal.

2. Pelaksanaan zakat oleh perorangan juga banyak. Ada juga beberapa orang atau kelompok yang peduli dengan masalah pengumpulan zakat. Mereka dari kalangan jamaah masjid, mushola atau lingkungan RT, RW, dusun atau desa, membentuk panitia pengumpulan zakat dan pembagiannya. Mereka berusaha mengelola zakat fitrah dan zakat *māl*. Ada yang mengumpulkan zakat kemudian langsung membagikannya kepada mustahik-nya. Ada yang mengumpulkan zakat hasil pertanian pada waktu panen, lalu disimpan untuk dibagikan pada waktu-waktu paceklik, sebagai zakat konsumtif. tetapi hal itu memunculkan permasalahan antara lain, seberapakah pengetahuan fiqih mereka tentang zakat; seberapa kesadaran mereka untuk melaksanakan kewajiban zakat. dan jika telah melakukan apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan yang seharusnya.

3. Undang-undang Republik Indonesia tentang zakat sudah lama diundangkan, tetapi bagaimana implemantasinya dan pengaruhnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di masyarakat belum terlihat nyata.

4. Bagaimana dan seberapa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mensosialisasikan undang-undang zakat dan melaksanaannya juga masih menjadi pertanyaan yang besar.

Selain itu, menurut fenomenologi, yang tampak bukan merupakan fakta atau realitas yang sesungguhnya, sebab ia hanya merupakan refleksi dari yang ada di baliknya. Kedua, fenomenologi merupakan jenis paradigma penelitian sebagai kontras dari positivistik. Jika positivistik merupakan akar-akar metode penelitian kuantitatif, maka fenomenologi merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif. Jika positivistik lebih memusatkan perhatian pada data yang empirik dan mencari hubungan antar-variabel, maka fenomenologi sebaliknya berfokus pada data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan utuh. Ketiga, fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif subjek. Karena itu, subjek yang berbeda karena memiliki pengalaman berbeda akan memahami gejala yang sama dengan pandangan yang berbeda. Lewat wawancara yang mendalam, peneliti fenomenologi berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya,²⁹ sehingga yang membedakan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain, adalah bahwa fenomenologi menggunakan orang sebagai subjek kajian, bukan teks atau organisasi.

Mazhab fenomenologi adalah mazhab yang melihat fenomena sebagai sesuatu hal yang dapat diamati dengan indera dan diteliti secara ilmiah, tentang gejala atau peristiwa yang penting atau sangat menarik perhatian.

²⁹ Abdullah Muhammad al-Sharīf, *Manāhij al-Baḥth al-‘Ilmiy Dalīl al-Ṭālib fī Kitābat al-Abḥāth wa al-Rasā’il al-‘Ilmiyyah*, (Iskandariya: Maktabat al-Shu‘ā’ liṭṭibā‘ah wa al-Nashr, 1996), 129-130.

kajian yang masing-masing cakupannya sangat luas dan komprehensif, meskipun dengan spesifikasi dari tiap peneliti. Penelitian Yūsuf al-Qaraḍawiy dengan *Fiqh al-Zakāh*-nya merupakan studi komparatif hukum zakat dengan pendekatan filosofis al-Qur'an dan Sunnah. Āyāt Allah al-'Uzmā Ḥusayn 'Aliy al-Muntaẓiriy, dalam karyanya *Kitāb al-Zakāh*, menekankan aspek fiqh klasik secara umum dan belum banyak membahas hal-hal yang bersifat kekinian. Abdullah ibn Manṣūr al-Ghafiliy dengan *Nawāzil al-Zakāh Dirāsah Fiqhiyyah Ta'sīliyyah Limustajiddāt al-Zakāh*, menekankan kajiannya kepada hal-hal yang kontemporer terkait semua hukum zakat. Fu'ād Abdullah al-'Umar, dalam bukunya *Idārat Mu'assasat al-Zakāh fī al-Mujtama'āt al-Mu'āṣirah, Dirāsah Tahfīliyyah Muqārinah Ma'a Bayt al-Zakāh fī Dawlat al-Kuwayt*, menekankan kajiannya pada manajemen lembaga zakat di beberapa negara Islam yang dikomparasikan dengan manajemen zakat di rumah zakat Kuwait. Kelompok kedua dua kajian umum tentang zakat secara normatif dalam konteks ekonomi makro Indonesia. Syechul Hadi Permono dengan *Pendayagunaan Zakat disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam kajiannya telah mengaitkan pendayagunaan zakat dengan pajak yang merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Didin Hafidhuddin, dengan *Zakat Dalam Perekonomian Modern* nya, menyoroti pengelolaan zakat secara nasional yang belum optimal dan keterbatasan pendayagunaan penyalurannya pada fakir miskin. Sedangkan kelompok ketiga lima kajian yang cakupannya lokal kedaerahan.terkait dengan BAZ di

	filosofi.	<p><i>Ta'şīliyyah Limustajiddāt al-Zakāh.</i></p> <p>4. Fu'ād Abdullah al-'Umar: <i>Idārat Mu'assasat al-Zakāh fī al-Mujtama'āt al-Mu'āşirah, Dirāsah Tahfīliyyah Muqārinah Ma'a Bayt al-Zakāh fī Dawlat al-Kuwayt.</i></p>
Kedua	Umum normatif dalam konteks ekonomi Indonesia.	<p>1. Syechul Hadi Permono: <i>Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional,</i></p> <p>2. Didin Hafidhuddin, <i>Zakat Dalam Perekonomian Modern,</i></p>
Ketiga	Zakat aplikatif lokal kedaerahan terkait BAZ dan LAZ.	<p>1. Muhammad Hadi: <i>Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur.</i></p> <p>2. Fakhruddin: <i>Zakat Produktif di Kota Malang, Studi Tentang Respons Mustahik Kota Malang Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme.</i></p> <p>3. Saifuddin Zuhri dalam tesisnya yang berjudul <i>Konsep al-Qur'an Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui</i></p>

Dalam bab ini diuraikan pengertian zakat dan hikmahnya, dan pengelolaan zakat yang meliputi pengelola zakat, kriteria pengelola, fungsi dan tugas pengelola zakat; dan pelebagaan pengelola zakat.

Bab ketiga *setting* sosial dan ekonomi kabupaten ponorogo. Bab ini mendeskripsikan Kabupaten Ponorogo dari aspek letak geografis, sejarah, seni budaya, kondisi keagamaan, pendidikan dan perekonomiannya. Selain itu juga dideskripsikan secara umum peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat.

Bab keempat, berisi pengelolaan zakat di Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini diuraikan estimasi peta potensi zakat di Kabupaten Ponorogo, dan paparan data dan temuan penelitian dari kegiatan pengelolaan zakat di masyarakat oleh badan atau lembaga amil zakat, panitia, tim atau unit pengumpul zakat..maupun perorangan.

Bab kelima analisis model pengelolaan zakat. Dalam bab ini dipaparkan analisis dan pembahasan data temuan tentang pengelolaan zakat yang ditemukan dari lapangan untuk merumuskan teori-teori yang terkandung dalam temuan lapangan. Analisis data dalam bab ini diarahkan kepada klasifikasi model pengelolaan zakat; kelebihan dan kekurangan masing-masing model; dan formulasi model atau tipe yang ideal dalam pengelolaan zakat.

Bab keenam, penutup. Bab penutup ini memuat kesimpulan penelitian, implikasi teoretik, rekomendasi dan kalimat penutup.